



**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA SMP SWASTA PANCA
BUDI NAMOTONGAN
KEC. KUTAMBARU
KAB. LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

NUR HASANAH
NPM 1515100263

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan) terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat. Rumusan masalah ini adalah apakah penerapan *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan) berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru kab. Langkat. Jenis penelitian ini adalah asosiatif/kuantitatif, dengan populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh guru dan staf tata usaha (berjumlah 18), serta perwakilan siswa-siswi kelas VII sampai kelas IX (berjumlah 30) di SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat. Jenis data adalah data primer yaitu berupa hasil angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil angket menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS, dimana F_{hitung} sebesar 13.313 sedangkan F_{tabel} 2,71 sehingga secara simultan penerapan *Good Governance* secara bersama-sama signifikan mempengaruhi pencapaian tujuan dana BOS. Sehingga secara parsial efektivitas dan efisiensi t_{hitung} sebesar -2.329 artinya efektivitas dan efisiensi secara parsial tidak signifikan mempengaruhi pencapaian tujuan dana BOS, akuntabilitas t_{hitung} sebesar 2.580 artinya akuntabilitas secara parsial signifikan mempengaruhi pencapaian tujuan dana BOS, transparansi t_{hitung} sebesar 2.163 artinya transparansi secara parsial signifikan mempengaruhi pencapaian tujuan dana BOS, serta kesetaraan sebesar 3.486 artinya kesetaraan secara parsial signifikan mempengaruhi pencapaian tujuan dana BOS .

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas dan Efisiensi, Kesetaraan, dan Pencapaian Tujuan Dana BOS

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of Good Governance (accountability, transparency, effectiveness and efficiency, as well as equality) on achieving the objectives of BOS funds at SMP Swasta Panca Budi Namotongan kec. Kutambaru Kab. Langkat. The formulation of this problem is whether the application of Good Governance (accountability, transparency, effectiveness and efficiency, as well as equality) affects the achievement of the objectives of BOS funds at SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru kab. Langkat. This type of research is associative / quantitative, with the population and sample used are all teachers and administrative staff (a total of 18), as well as representatives of class VII to class IX students (totaling 30) in SMP Swasta Panca Budi Namotongan , Kec. Kutambaru Kab. Langkat. The type of data is primary data in the form of questionnaire results. Data analysis techniques using linear regression analysis. The results of the questionnaire showed that the implementation of Good Governance (accountability, transparency, effectiveness and efficiency, as well as equality) had a positive and significant effect on the achievement of BOS fund objectives, where F_{hitung} was 13.313 while F_{table} 2,71 so that simultaneously the implementation of Good Governance together significantly affected achievement of the objectives of BOS funds. So partially t_{count} effectiveness and efficiency is -2.329 which means partial effectiveness and efficiency does not significantly affect the achievement of BOS fund objectives, t_{count} accountability is 2.580 which means that accountability is partially significantly influencing the achievement of BOS fund objectives, t_{count} transparency is 2.163 which means that transparency is partially significantly affecting achievement of the BOS funds goals, as well as equality of 3.486 which means that equality is partially significantly influencing the achievement of the BOS fund objectives.

Keywords: *Accountability, Transparency, Effectiveness and Efficiency, Equality, and Achievement of BOS Fund Objectives*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN TIDAK PERBAIKAN NILAI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian dan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1. <i>Good Governance</i>	10
2.1.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam <i>Good Governance</i>	18
2.1.3. Implementasi Kebijakan Pendidikan	19
2.1.4. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2.1. Tempat Penelitian	30
3.2.2. Waktu Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1. Populasi dan Sampel	31
3.3.2. Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian	32
3.4.1. Variabel Penelitian	32
3.4.2. Definisi Operasional	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.6.1. Uji Kualitas Data	34
3.6.2. Asumsi Data/Asumsi Klasik	35
3.6.3. Regresi Linier Berganda	37
3.6.4. Uji Hipotesis	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	 40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1. Sejarah Singkat SMP Swasta Panca Budi Namotongan	40
4.2 Profil Sekolah	41
4.2.1. Bangunan	41
4.2.2. Jumlah Siswa	42
4.2.3. Jumlah Tenaga Pendidik dan Tata Usaha	42
4.3 Visi, Misi Dan Tujuan SMP Swasta Panca Budi Namotongan	42
4.3.1. Visi	43
4.3.2. Misi	43
4.3.3. Tujuan Sekolah	44
4.4 Struktur Organisasi	45
4.4.1. Deskripsi Jabatan	45
4.5 Pengolahan Data	54
4.5.1. Uji Kualitas Data	55
4.5.2. Uji Reliabilitas	58
4.5.3. Uji Asumsi Klasik	58
4.5.4. Regresi Linier Berganda	62
4.5.5. Hasil Uji Hipotesis	63
4.6 Pembahasan	65
 BAB V	 70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71

Daftar Pustaka
Lampiran

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 3.2 Data Responden	32
Tabel 3.3 Defenisi Operasioanl Variabel	33
Tabel 4.1 Uji Validitas X1 Pertanyaan-pertanyaan Pada Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (Akuntabilitas)	55
Tabel 4.2 Uji Validitas X2 Pertanyaan-pertanyaan Pada Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (Transparansi)	55
Tabel 4.3 Uji Validitas X3 Pertanyaan-pertanyaan Pada Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (Efektivitas dan Efesiensi)	56
Tabel 4.4 Uji Validitas X4 Pertanyaan-pertanyaan Pada Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (Kesetaraan)	57
Tabel 4.5 Uji Validitas Y Pertanyaan-pertanyaan Pada Variabel Pencapaian Tujuan Dana BOS	57
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.7 Uji Normalitas <i>Komolgriv-Simornov</i>	59
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.9 Uji Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4.10 Uji F (Simultan)	63
Tabel 4.11 Koefesien Determinasi	65

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	45
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot	59
Gambar 4.2 Scaterplot-Uji Heteroskedastisitas	61

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada waktunya penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Pencapaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat”**.

Selama dalam tahap penyelesaian proposal ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan namun dengan keyakinan dan atas bantuan Allah SWT. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan proposal ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan proposal saya.
5. Ibu Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si., selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan proposal.
6. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Bambang Syahputra dan ibunda Siti Yunarti yang telah mengasuh dan membesarkan

saya sampai saat ini. Serta senantiasa memberikan dorongan moril dan materi, seiring dengan do'a restu dan Ridho mereka selama saya melakukan penelitian skripsi saya, dan terimakasih jugak buat abang (Muhammad Khadapi S.Pd) dan kakak Annisa Mahmuda Amd.Kep) saya yang telah menajdi motivasi selama ini.

7. Seluruh Staf dan Pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam usaha surat-menyurat.
8. Krisnadi S.Pd S.Kom Selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat yang telah banyak membantu dan mengijinkan untuk melakukan penelitian di SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku dan Muhlis yang telah saling mendoakan, memberikan masukan, motivasi dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi yaitu Rizki Wulandari, Astri Khamalia, Putri Gusti Rismayona dan seluruh teman-teman Akuntansi Reguler Siang B 2015.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, saya ucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2020

Penulis,

NUR HASANAH

1515100263

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan defenisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi dalam hal ini, sekot publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya, berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, transportasi, bahan bakar, dan lain-lain. Namun , untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta seperti fungsi birokrasi pemerintah.

Sebagai organisasi publik yang termasuk dalam organisasi nirlaba atau *non-profit* sekolah negeri ataupun swasta sering menjadi sorotan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan visi dan misi, tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur yang organisasi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi yang digunakan sebagai organisasi yang melayani publik di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu aspek penting yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Karena pendidikan yang menjadi penentu terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kemajuan suatu daerah. Tertuang

dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan, yang kemudian dikenal dengan program wajib belajar sembilan tahun.

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan khususnya pada era persaingan global masyarakat dituntut untuk mengikuti program wajib belajar sembilan tahun, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengadakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan, yaitu pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai bentuk pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diprioritaskan untuk pembiayaan operasional non personal, meskipun memungkinkan untuk pembiayaan kegiatan lain yang tergolong sebagai biaya personal dan biaya investasi. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan menjamin siswa miskin agar tetap bersekolah dengan membebaskan iuran sekolah. Sejak mulai diterapkan pada bulan Juli 2005, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berperan secara signifikan dalam pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. Akan tetapi guru dan warga sekolah tidak mengetahui secara jelas mengenai pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Dengan adanya program dana BOS, sekolah

dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Dana BOS merupakan Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalias selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah), disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Selama ini praktik masalah utama dana BOS terletak pada lambatna penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang kurang transparan. Selama ini, keterlambatan trasnfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dana lamanya keluar Surat Pengantar Pencairan Dana (SP2D) oleh tim manajer BOS daerah. Maka dari itu dalam pengelolaan dana BOS, pihak sekolah harus didukung dengan prinsip *Good Governance*. Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terkahir ini isitilah *Good*

Governance kian populer. *Good Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, maupun sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. *Good Governance* sudah menjadi isu penting dalam suatu organisasi karena *Good Governance* mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial. *Good Governance* adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggung jawaban penyediaan lapangan kerja, pelayanan publik dan privat, pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi dan pertanggung jawaban organisasi tidak peduli apakah organisasi publik atau privat: *Good Governance* telah menjadi agenda pokok internasional (Indra Bastian, 2014).

Pihak sekolah sangat memerlukan prinsip *Good Governance* dalam upaya mewujudkan pengelolaan program dana BOS yang diterima oleh sekolah. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BOS masih kurangnya penerapan *Good Governance* (akuntabel, transparan, efektif dan efisien, serta kesetaraan), padahal penggunaan tersebut mestinya melibatkan orangtua siswa sejak perencanaan hingga pelaporan. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar orangtua siswa pernah mendengar adanya program BOS. Namun, masih sangat sedikit orangtua yang tahu informasi yang lebih rinci tentang BOS, terutama menyangkut jumlah dana BOS per siswa serta penggunaannya, sehingga dikhawatirkan pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan alokasi penggunaan dana yang dimaksud oleh pemerintah. Oleh karena itu pihak sekolah harus menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaan sarana prasarana, membiaya kegiatan-kegiatan seperti pembayaran honorium bulanan guru, pembiayaan perawatan sekolah, pembiayaan langganan

daya dan jasa, pembelian bahan-bahan habis pakai, pengembangan profesi guru seperti pelatihan, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian komputer.

Salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menarik bagi peneliti adalah salah Satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Panca Budi yang ada di Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, selain padat penduduk wilayah ini merupakan wilayah yang paling dekat dengan desa lainnya sehingga banyak dampak positif dan negatif bagi sekolah dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru – Kab. Langkat”**.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

- a. Pihak sekolah masih kurang dalam melaksanakan penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana BOS .
- b. Pihak sekolah tidak melakukan pembiayaan/penggunaan yang ada di daftar (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) RKAS/ (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) RAPBS dengan cara akuntabel, transparan, efektif dan efisien, serta kesetaraan.

1.2.2. Batasan Masalah

Dalam mengadakan suatu penelitian terhadap objek yang diteliti, maka terlebih dahulu ditentukan batasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas. Penulis membatasi penelitian pada penerapan *good governance* serta pencapaian tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat. Dengan komponen *Good Governance* yaitu : (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Efektivitas dan Efisiensi, serta (4) Kesetaraan.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Akuntabilitas, Transparansi Efektivitas dan Efisiensi, Kesetaraan berpengaruh secara parsial terhadap pencapaian tujuan dana Bantuan Operasioan Sekolah (BOS) pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.
- b. Apakah Akuntabilitas, Transparansi Efektivitas dan Efisiensi, Kesetaraan berpengaruh secara simultan terhadap pencapaian tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

1.2.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Dan Efisiensi, Kesetaraan Secara Parsial Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.
2. Untuk Mengetahui Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Dan Efisiensi, Kesetaraan Secara Simultan Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan penerapan *good governance* yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan teori *good governance* dalam pencapaian tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan menambah wawasan dan pengetahuan praktis sebagai bekal ke masyarakat.

- b) Bagi pihak sekolah, digunakan sebagai bahan masukan khususnya dalam mengoperasionalkan danan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- c) Bagi komite sekolah, sebagai bahan acuan dalam pengawasan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.3. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian L.Jurhanie Isfan Pratama (2016), yang berjudul Analisis Prinsip *Good Governance* Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta). Sedangkan peneliti melakukan peneliti melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerpan *Good Governancen* Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya :

- a. Penelitian terdahulu dilakukan di SD se-kecamatan kasihan bantul yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di satu sekolah yaitu di SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat .
- b. Penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel bebas yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), serta 1 variabel terikat yaitu Pencapaian Tujuan Dana BOS (Y). Sedangkan penelitan ini menggunakan 4 variabel bebas yaitu Pengaruh Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Efektifitas dan

Efisiensi (X3), Kesetaraan (X4), serta 1 variabel terikat yaitu Pencapaian Tujuan Dana BOS (Y).

- c. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan (Ovi Aldino Akbar, 2015).

Istilah *Governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *Governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi *Good Governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih Nuryanto.A.Daim (2014).

Berdasarkan literatur manajemen, *leader* adalah pemain utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Ini sesuai dengan konsep *Good Governance* dimana kita ketahui bahwa pemain kunci penegakan *Good Governance* dalam suatu organisasi berada pada para eksekutif. Dalam konteks manajemen modern sekarang ini sistem *Governance* memerlukan perhatian yang

besar selaras dengan makin kompleksnya organisasi dan tuntutan dari para *Stakeholder*.

UNDP (dalam Ely Siswanto, 2013) merekomendasikan beberapa karakteristik *Good Governance*, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan instansi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokrasi dan keuangan (*financial*), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

World Bank (dalam Ely Siswanto, 2013) mengungkapkan sejumlah karakteristik *Good Governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Asian Development Bank (dalam Ely Siswanto, 2013) menegaskan adanya konsensus umum bahwa *Good Governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transperancy*, (3) *predicability*, dan (4) *participation*. Konsep *Good Governance* pada awalnya didasari gagasan yang sifatnya interdependensi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses kebijakan publik dapat direduksi secara efektif dan berhasil, maka diperlukan interaksi antar negara, masyarakatan dan pihak swasta yang harus dilandasi dengan unsur akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan kesetaraan.

a. Akuntabilitas

Mahmudi (2010:23) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya

publik kepada pemberi mandat. Menurut (Mardiasmo 2009:20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (2009) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).

b. Fungsi Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:69) agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas perlu diterapkan “

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Hal penting dalam membentuk suatu pernyataan dengan cara konsisten. Pada dasarnya tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi sulit pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan diukur.

2. Pola pengukuran tujuan, setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program memerlukan cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
3. Pengakomodasian sistem intensif, suatu sistem intensif perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem intensif harus diterapkan secara hati-hati. Karena bisa menyebabkan sistem intensif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.
4. Pelaporan dan penggunaan data, suatu akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang secara hati-hati, dalam arti informasi yang disampaikan atau disajikan benar-benar berguna bagi pemimpin yang dikoordinasikan.

c. Jenis-jenis Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:21) secara umum akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

d. Prinsip Akuntabilitas

Indra Bastian (2015:158) pemerintah yang akuntabel memiliki prinsip sebagai berikut :

1. Prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat, dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum, sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan.

e. Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator pencapaian prinsip akuntabilitas yang dikemukakan Indra Bastian (2015;158) antara lain :

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga sektor publik.

2. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan.
3. Penyusunan laporan keuangan.
4. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.
5. Partisipasi *stakeholder* dalam menciptakan akuntabilitas.

f. Transparansi

Mardiasmo (2011), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Organisasi berkewajiban memberikan informasi terkait dengan informasi keuangan dan informasi lain nya yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan, serta informasi yang disediakan harus disediakan dengan format ayau bahkan media yang mudah dimengerti.

Indra Bastian (2015:157), transparansi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungannya. Berkaitan dengan hal tersebut, para pemimpin organisasi sektor publik perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Para pemimpin organisasi sektor publik perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Transparansi merupakan suatu organisasi sektor publik yang ada harus menyediakan informasi ke publik secara terbuka, sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor lembaga-lembaga publik beserta proses kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuaran dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

g. Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip pencapaian transparansi yang dikemukakan Indra Bastian (2015:158) antara lain :

1. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas desentralisasi dan transparansi.
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti untuk hidup layak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lain-lain.
3. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

h. Indikator Transparansi

Fauzan (2013) berpendapat bahwa indikator pencapaian prinsip transparansi yang harus dipenuhi :

1. Kejelasan peran dan tanggungjawab pengelola keuangan sekolah.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik.
3. Penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran keuangan sekolah.
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Ketersediaan informasi publik.

i. Efektivitas dan Efesiensi

Indra Bastian (2015:161) efektivitas dan efisiensi merupakan pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Para pimpinan lembaga-lembaga publik yang bergerak dibidang pelayanan jasa harus mempunyai mekanisme untuk menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisien merupakan organisasi sektor publik yang ada telah memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya dengan cara yang paling baik, atau melalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.

j. Indikator Efektifitas dan Efisiensi

Beberapa indikator pencapaian prinsip efektifitas dan efisiensi yang dikemukakan Indra Bastian (2015:161) antara lain :

1. Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
2. Pengelolaan pendapatan.
3. Berkurangnya biaya operasional pelayanan.
4. Pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya.
5. Adanya kepuasan survei.

k. Kesetaraan

Indra Bastian (2015:160) kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan

untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan.

1. Indikator Kesetaraan

Adapun indikator pencapaian prinsip kesetaraan yang dikemukakan Indra Bastian (2015:160) sebagai berikut :

1. Berkurangnya kasus diskriminasi.
2. Adanya kesetaraan gender.
3. Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
5. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan informasi dana BOS.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam *Good Governance*

Muhammad Ali (2017) Pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan pelaksanaan/eksekusi kebijakan baik dari kebijakan pendidikan nasional/pusat atau kebijakan pendidikan provinsi maupun kebijakan pendidikan kota. Dalam mengeksekusi kebijakan, dinas pendidikan melakukan dengan menerapkan fungsi manajemen khususnya *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (menggerakkan) dan *controlling* (pengendalian/evaluasi). Disamping itu eksekusi kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dengan *Good Governance*.

Tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dilakukan adalah melaksanakan tiga fungsi manajemen yaitu *organizing*, *actuating* dan *controlling*.

Aktivitas dalam tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap pengorganisasian (*organizing*)

Tahap pengorganisasian yaitu melakukan kegiatan pengorganisasian sumber daya, seperti: (a) desain organisasi dan struktur organisasi kegiatan, (b) pembagian pekerjaan, rekrutmen dan penempatan SDM, (c) pendelegasian tugas, (d) integrasi dan koordinasi SDM, (e) pengembangan kapasitas organisasi dan SDM, (f) membangun budaya organisasi.

b. Tahap menggerakkan (*actuating*)

Tahap menggerakkan yaitu memimpin pelaksanaan kegiatan, seperti: (a) memotivasi SDM dalam tim, (b) melakukan penjaminan mutu dalam setiap kegiatan dan pelayanan, (c) mengembangkan etika, (d) mengembang kerjasama tim, (e) membangun komunikasi organisasi, (f) melakukan negosiasi dengan berbagai pihak terkait.

c. Tahap Pengendalian (*controlling*)

Tahap pengendalian yaitu melakukan kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan, seperti: (a) mendesain pengendalian pelaksanaan kebijakan, (b) melakukan pengendalian kegiatan dan anggaran, (c) melakukan audit.

2.1.3. Implementasi kebijakan pendidikan

Sasarannya adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan. Hasil yang dicapai oleh implementasi kebijakan pendidikan adalah mutu pendidikan masyarakat. Untuk itu otonomi pendidikan yang sebagian besar kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, tanggung jawab untuk mencapai tujuan yaitu mutu pendidikan, sangat tergantung pada pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tersebut.

2.1.4. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Definisi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan salah satu program pemerintah untuk rakyat dalam upaya ikut menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Sejak Juli 2005, pemerintah telah menyediakan dana BOS bagi SD/MI, SMP/MTs, pesantren salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dana itu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 “Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan”. Menurut Ghozali (2010), Dana BOS adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana BOS merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai satuan pendidikan sebagai bentuk perwujudan program wajib belajar sembilan tahun.

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, tujuan dana BOS adalah untuk:

1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia.
2. Meningkatkan angka partisipasi kasar.
3. Mengurangi angka putus sekolah.
4. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan

(*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah;

a) Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau

b) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

c. Komponen Pembiayaan Dana BOS

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019

komponen pembiayaan dana BOS terdiri dari:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan murid baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
2. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventarsi, minuman dan makan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadangan alat kantor.
3. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan, persiapan ujian, olahraga, kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler.

5. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perawatan fasilitas sekolah lainnya.
6. Pembayaran honorarium bulanan guru.
7. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
8. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank.
9. Pembelian alat multi media pembelajaran.

d. Sasaran

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin

kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang bersangkutan.

e. Satuan Biaya

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 satuan biaya BOS untuk:

1. SD/SDLB : Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun
2. SMP/SMPLB : Rp. 1.000.000,-/peserta didik/tahun
3. SMA/SMALB dan SMK : Rp. 1.400.000,-/peserta didik/tahun

f. Waktu Penyaluran

Penyaluran BOS dilakukan setiap tiga bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (semester), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

g. Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau

pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, akuntabel, dan transparan.
2. Melakukan evaluasi setiap tahun.
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a) RKAS memuat BOS.
 - b) RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun.
 - c) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah.
 - d) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

h. Landasan Hukum

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2019 antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- i. Indikator Pencapaian Tujuan Dana BOS
- Ahmad farid safri (2017) berpendapat bahwa indikator pencapaian tujuan dana BOS yang harus terpenuhi :
1. Memenuhi biaya kebutuhan pendidikan siswa miskin.
 2. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
 3. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja.
 4. Peningkatan kontrol audit dan mekanisme umpan balik.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	L. Jurhanie Isfan Pratama (2016)	Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Pencapaian Dana Bantuan Operasional Sekolah	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Manajemen Dana BOS (X3), <i>Good Governance</i> (Y).	Analisis Deskriptif dan Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi.
2.	May Nurhidayah (2014)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengelolaan Dana BOS Di SMP Negeri Bilingual Boarding School (SBBS)	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Responbiliti (X3) Pengelolaan Dana BOS	Analisis Deskriptif dan Analisis regresi linier berganda	Penerapan GCG di SMP Negeri Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) prinsip transparansi, responbiliti telah diterapkan dengan baik, karena memiliki nilai positif terhadap pengelolaan dana BOS, sedangkan untuk penerapan prinsip akuntabilitas menunjukkan hasil yang negatif.
3.	Ahmad Farid Safri (2017)	Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Pendapatan Orang Tuan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar	Porgram Dana BOS (X1) Pendapatan Orang Tua (X2) Prestasi Belajar (Y)	Analisis Deskriptif dan Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana BOS dan Pendapatan orang tua memiliki Kontribusi sebesar 62,7% terhadap prestasi belajar siswa kelas X akuntansi.
4.	Fauzan (2013)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Perilaku Etis	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2)	Deskriptif dan Regresi Linier	Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel independen

		Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Pertanggungjawaban (3) Efektivitas dan Efisien (X4) Kesetaraan (X5) Perilaku Etis Pengelolaan Dana BOS(Y)		secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial transparansi yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana BOS.
--	--	--	--	--	---

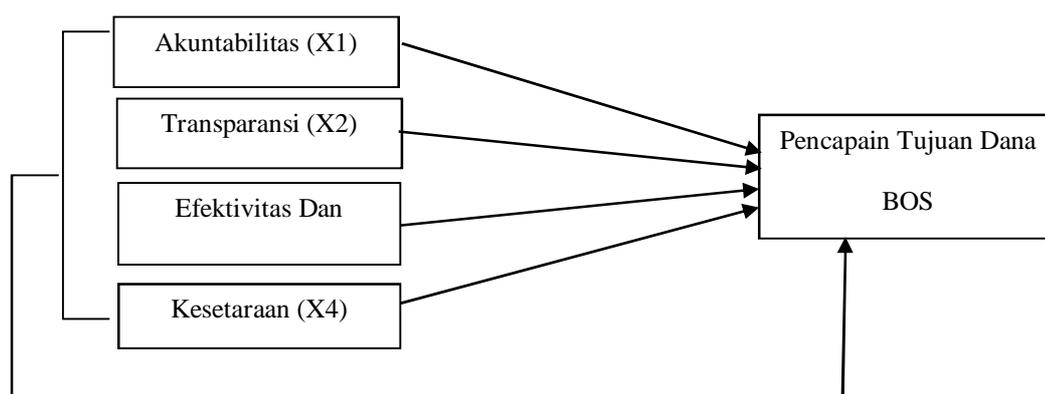
2.3.Kerangka Konseptual

Dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah berasal dari pengelolaan dana BOS, dana yang bersumber dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Maka pengelolaan dana harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan. Salah satunya dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang terdiri dari akuntabel, transparan, efektif dan efesein, serta kesetaraan dapat meningkatkan pencapaian tujuan dana BOS dalam proses belajar mengajar.

Dalam kerangka konsep ini dijelaskan bahwa akuntabilitas yang diterapkan oleh pengelola dana BOS diharapkan penyaluran dana BOS mencapai target dan sasarannya, dengan menggunakan serta menerapkan transparansi yang semakin tinggi maka diharapkan pengelolaan dana BOS dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kemendikmud, dengan diterapkan efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan dana BOS maka pelayanan pihak sekolah dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dana BOS, serta diterapkannya kesetaraan dapat dilakukan pengkontribusi antara kepala sekolah dan dewan guru dalam penyusunan RKAS agar dapat pencapaian tujuan dana BOS. Karena semangkin

tinggi tingkat penerapan *Good Governance* di SMP Swasta Panca Budi Namotongan maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian tujuan dana BOS secara parsial. Dengan demikian semakin tinggi tingkat penerapana *Good Governance* di SMP Swasta Panca Budi maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan dana BOS secara simultan. Esensi dari *good governance* adalah suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, *good governance* akan tercipta manakala di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, lembaga usaha, swasta, danlain-lain) memiliki keseimbangan dalam proses *checks and balance* dan tidak boleh satu pun diantara mereka yang memiliki kontrol absolut (Indra Bastian : 143). Menurut landasan teori mengenai akuntabilitas, transparansi efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis, 2019

2.4.Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel (Rusiadi dkk, 2014:74).

1. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP swasta panca budi namotongan.
2. Secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP swasta panca budi namotongan.
3. Secara parsial efektivitas dan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP swasta panca budi namotongan.
4. Secara parsial kesetaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP swasta panca budi namotongan.
5. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP swasta panca budi namotongan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014:12), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Swasta Panca Budi Namotongan yang beralamat di JL.Mbacang-Karang Rejo Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019. Berikut ini rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	Jenis kegiatan	Des' 18	Jan'- Juni' 19	Jul' 19	Ags'- Des 19	Jan' 20	Feb'20
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■					
2	Penyusunan proposal		■	■			
3	Seminar proposal				■		
4	Perbaikan/Acc Proposal				■		
5	Pengolahan data					■	
6	Penyusunan skripsi					■	
7	Bimbingan Skripsi						■
8	Sidang Meja Hijau						■

3.3. Populasi dan Sampel/Jenis Sumber Data

3.3.1. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2010:117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru-guru, serta beberapa perwakilan murid di SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

Sugiyono (2010:117) Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Dalam pengambilan sampel sedikitnya beberapa yang melandasinya yaitu : keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, lebih cepat dan lebih mudah, memberi informasi yang lebih banyak dan lebih mendalam, maka penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Maka dari itu sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi tersebut. Dari jumlah populasi yang telah

diuraikan maka peneliti melakukan pengambil sampel dengan metode sensus yaitu semua populasi dijadikan sebagai sampel sebanyak 48 yang terdiri dari 25 guru, 5 komite sekolah, dan 18 perwakilan orang tua murid SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru. Berikut ini tabel responden sampel penelitian adalah :

Tabel 3.2. Data Responden

No	Jabatan	Jumlah
1.	Guru SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab.Langkat	25
2.	Komite Sekolah (Tingkat SMP)	5
3.	Wali Murid	18
Jumlah		48

3.3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer. Data primer adalah data kuantitatif yang berupa kuesioner/angket. Sumber data diperoleh dari guru-guru, dan wali murid SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

3.4. Defenisi Operasional dan Varibel Penelitian

3.4.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang diliti. Penelitian ini menggunakan lima (variabel) *independent* variabel yaitu : Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Efektivitas dan Efisiensi (X3), Kesetaraan (X4), dan *dependent* variabel yaitu : Pencapaian Tujuan Dana Bos (Y).

3.4.2. Defenisi Operasional.

Untuk memudahkan dan megarahkan penelitian,maka diperlukan defenisi variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

Tabel 3.3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas (x1)	<p>Pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (<i>check and balance system</i>).</p> <p>(Indra Bastian 2015:149)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya keprcayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga sektor publik. 2) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabka n. 3) Penyusunan laporan keuangan 4) Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat. 5) Partisipasi <i>stakeholder</i> dalm menciptakan akuntabilitas <p>(Indra Bastian 2015:158)</p>	Likert
Transparansi (x2)	<p>Masyarakat dan semua aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang, menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati.</p> <p>(Indra Bastian 2015 : 151)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kejelasan peran dan tanggungjawab pengelola keuangan sekolah. 2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. 3) Penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran keuangan sekolah. 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 5) Ketersediaan informasi publik. <p>(fauzan 2013)</p>	Likert
Efektivitas dan Efesiensi (x3)	<p>Para pimpinan lembaga-lembaga publik yang bergerak dibidang jasa pelayanan umum harus mempunyai mekanisme untuk menginformasikan tentang biaya dan jenis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya. 2) Adanya survei kepuasan, 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan nilai tambah dari 	Likert

	pelayanannya. (Indra Bastian 2015: 161)	pelayanan masyarakat. 4) Berkurangnya biaya operasional pelayanan. 5) Pengelolaan pendapatan. (Indra Bastian 2015 ; 161)	
Kesetaraan (x4)	Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. (Indra Bastian 2015:160)	1) Berkurangnya kasus diskriminasi. 2) Adanya kesetaraan gender. 3) Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan. 4) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. 5) Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan informasi dana BOS. (Indra Bastian 2015:160)	Likert
Pencapaian Tujuan Dana BOS (y)	Untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan. (ahmad farid safri : 2017)	1) Memenuhi biaya kebutuhan pendidikan siswa miskin. 2) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah. 3) Mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja. 4) Pencapaian pengelolaan Dana BOS. 5) Peningkatan kontrol, audit dan mekanisme umpan balik (ahmad farid safri : 2017)	Likert

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data primer teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuisisioner) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala yang digunakan merupakan skala likert dengan jawaban bertingkat 5 kategori dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sedangkan data sekunder berupa dokumen laporan keuangan dana BOS sebagai bukti pendukung agar tercapainya tujuan dana BOS.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas (*validityTest*) bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur yang ingin dikeluarkan sesuai dengan fungsinya, dan harus memenuhi sejumlah kriteria. Maka dari itu kuesioner harus diuji sah atau tidaknya dengan pengujian validitas agar menghasilkan data yang benar.

Hasil uji validitas dapat dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya pengujian ini dikatakan valid apabila r hitung (koefisien korelasi) > dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikansi 5% atau 0,05.

b. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek tidak berubah. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,6.

3.6.2. Asumsi Data/Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data residual normal, uji normalitas terhadap residual dengan

menggunakan *komolgrov-smirnov*. Maka garis yang menggambarkan data mengikuti garis diagonal data sehingga layak dilakukan pengujian statistik.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2012:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Dalam uji multikolinearitas ini dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF \leq dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain untuk melihat penyebaran data. Model regresi yang baik adalah yang tidak Heteroskedastisitas yang berarti variansi dari residual adalah homogen (sama) pengamatan kepengamatan yang lain disebut homokedastisitas dengan ciri-ciri:

1. Apabila t hitung $>$ t tabelartinya terjadi Heterokedastisitas.

2. Apabila t hitung $<$ t tabel artinya terjadi Homokedastisitas.

3.6.3. Regresi Linier Berganda

Teknik analisis penelitian menggunakan regresi linier berganda, dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Variabel dependen (Penca[ai]an Tujuan Dana BOS)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi
X1	= Variabel independen (Akuntabilitas)
X2	= Variabel independen (Transparansi)
X3	= Variabel independen (Efektivitas dan Efisiensi)
X4	= Variabel independen (Kesetaraan)
e	= erro term/Tingkat Kesalahan

3.6.4. Uji Hipotesis

a. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini merupakan pengujian simultan (keseluruhan) yang menunjukkan apakah variabel inependen secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini bentuk hipotesisnya sebagai berikut :

Ho : variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen(Y).

Ha : variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ghozali (2011) menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka profitabilitas signifikan, yaitu :

1. Apabila profitabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Apabila profitabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian ini merupakan pengujian dari individual dari masing-masing variabel independen (bebas). Digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini bentuk hipotesis nya sebagai berikut :

H_0 : variabel independen (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

H_a : variabel independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

Dengan menggunakan angka profitabilitas, yaitu :

1. Jika profitabilitas signifikan > 0.05 , maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika profitabilitas signifikan $< 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

c. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen berarti memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat

SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat didirikan pada 15 Agustus 1981, sekolah tersebut didirikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Permohonan para orang tuas / wali murid dan masyarakat yang berada disekitar sekolah.
- b. Banyaknya jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada disekitar sekolah dan apabila anak-anaknya melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi menempuh jarak jauh ke lokasi SMP yang ada di kecamatan salopian (sebelum pemekaran kecamatan) atau di kecamatan bahorok.
- c. Situasi dan kondisi latar belakang ekonomi masyarakat yang sangat kurang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Yayasan Pendidikan Panca Budi melalui Dinas Pendidikan mambangun gedung SMP Swasta Panca Budi di tahun 1982. Pertama kali menerima murid baru di tahun ajaran 1982/1983 saat itu dipimpin oleh Bapak Ngalemi Sembiring dan dilanjutkan oleh Bapak Muridan, pada tahun 1983 SMP Swasta Panca Budi dipimpin oleh Bapak Tuahta Kembaren dan saat ini telah dipimpin oleh Krisnadi, S.Pd. SMP Swasta Panca Budi terletak

di Jalan Mbacang-Karang Rejo, Kode Pos 20773 Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat.

4.2. Profil Sekolah

Profil sekolah merupakan wadah organisasi atau lembaga yang mencurukan baik atau kurang baiknya wadah atau lembaga tersebut di antaranya beberapa komponen-komponen yang menunjang akan tercipta sebuah profil.

Nama Sekolah	: SMP Swasta Panca Budi Namotongan
Alamat	: Jl. Mbacang – Karang Rejo, Kec. Kutambaru-Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, 20773
NPSN	: 10201050
Jenjang Akreditasi	: B/Tahun 2013-2018
Tahun Didirikan	: 1982
Tahun beroperasi	: 1987
Kepemilikan tanah	: Yayasan
Luas Tanah	: 2400 m ²
Status Bangunan	: Yayasan
Luas seluruh Bangunan	: 350m ²

Adapun kondisi sekolah tersebut saat ini baik kondisi gedung, siswa dan kondisi tenaga pendidik/guru adalah sebagai berikut :

4.2.1. Bangunan

Bangunan terdiri atas :

- a. Ruang Belajar / ruang kelas 5 ruangan

- b. Ruang Perpustakaan belum ada
- c. Ruang Kantor 1 ruangan
- d. Ruang Keterampilan belum ada
- e. Ruang Laboaturium belum ada
- f. Rumah Dinas Penjaga belum ada
- g. WC terdiri atas 3 kamar, 1 kamar untuk putra dan 1 untuk putri, 1 untuk Kepala sekolah dan guru.

4.2.2. Jumlah Siswa

Pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah siswa sebanyak orang terdiri dari atas:

Kelas VII= 66 orang

Kelas VIII = 49 orang

Kelas IX = 10 orang

Jumlah Seluruhnya = 125 Orang.

4.2.3. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tata Usaha

Guru Tetap (GTY) : 16 Orang

Guru Bantu Honorer : - Orang

Staf Tata Usaha/Operator : 2 Orang

4.3. Visi, Misi Dan Tujuan Tingkat Satuan Pendidikan

Visi dan misi pendidikan nasional telah menjadi rumusan dan dituangkan pada bagian “penjelasan” atas UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi dan misi pendidikan nasional ini adalah merupakan bagian dari strategi pembaruan sistem pendidikan.

4.3.1. Visi

Dalam merumuskan visi, pihak- pihak yang terkait (*stake holders*) bermusyawarah , sehingga visi sekolah mewakili aspirasi berbagai kelompok yang terkait (guru, karyawan, siswa, orang tua, masyarakat dan pemerintah) secara bersama-sama mendukung dan berperan aktif mewujudkannya. Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang mempunyai filosofi dan ciri khas sekolah dan mudah kita ingat. Berikut ini merupakan visi yang dirumuskan di SMP Swasta Panca Budi Namotongan, “Mewujudkan Generasi yang Religius, berakhlakul karimah, Terampil dalam Berkarya, Berbudaya dan Amanah”.

Indikatornya :

- a. Unggul dalam prestasi akademik
- b. Unggul dalam aktifitas dan krevitas seni tari daerah.
- c. Unggul dalam bidang keterampilan pengolahan barang bekas
- d. Unggul dalam kegiatan keagamaan ROHIS dan PA
- e. Unggul dalam prestasi olahraga bola takraw dan karate

4.3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka perlu dibuat suatu misi yang dapat kita lakukan berupa kegiatan yang terarah dan jelas sasarannya.

Misi SMP Swasta Panca Budi Namotongan adalah :

- a. Mengembangkan kreatifitas dan semangat inovatif guru dalam menjalankan profesinya.
- b. Memperkuat komitmen bersama dan melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan.

- c. Menerapkan sistem pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).
- d. Mengoptimalkan pelayanan peserta didik dengan melengkapi dan memberdayakan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- e. Mengoptimalkan pengembangan diri dalam hal minat dan bakat siswa melalui program bimbingan konseling, dan ekstra kurikuler (KIR, Pramuka, UKS, PMR, SISPALA, Seni, olahraga pengembangan keorganisasian melalui OSIS).

4.3.3. Tujuan Sekolah

Sesuai apa yang direncanakan oleh SMP Swasta Panca Budi Namotongan, tujuan dari SMP Swasta Panca Budi ini menciptakan warga sekolah yang berprestasi dalam IPTEK (prestasi akademi, prestasi olahraga, dan kreatifitas seni dan informatika) dan berprestasi dalam IMTAQ (prestasi bidang keagamaan, berbudi luhur, bersemangat tinggi dan bermoral, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).

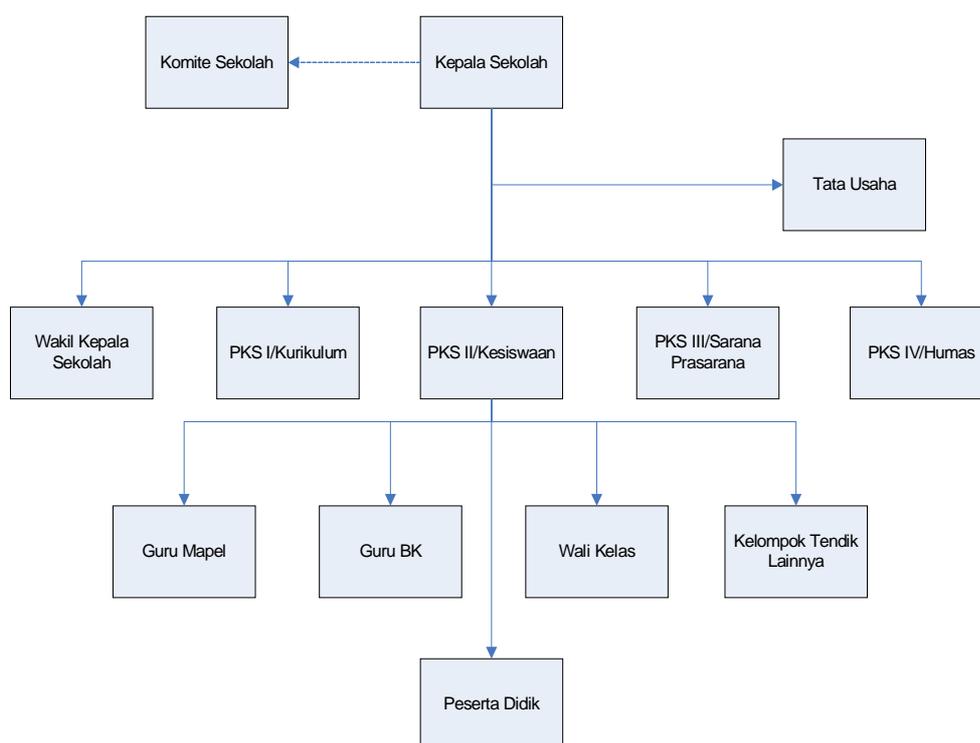
Jadi tujuan sekolah merupakan jabaran dari Visi dan Misi Sekolah. Adapun tujuan sekolah yang telah disusun oleh sekolah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peserta didik yang beragama dan berakhlak mulia
- b. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mewujudkan prestasi nilai ujian nasional dengan rata-rata 7.00
- d. Meningkatkan prestasi didik dalam bidang seni dan budaya
- e. Mewujudkan peserta didik yang sadar lingkungan
- f. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

4.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi SMP Swasta Panca Budi Namotongan dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Budi Nomor 01 Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekolah



Sumber: Krisnadi, S.Pd (2019)

4.4.1. Deskripsi Jabatan

Secara sistematis deskripsi jabatan pada struktur organisasi SMP Swasta Panca Budi Namotongan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kepala Sekolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru yang menggantikan PP 74 Tahun 2008 pasal 54 ayat 1 menyatakan

bahwa kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

1. Kepala Sekolah sebagai Pendidik (*Educator*)

- a) Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program pengajaran dan remedial.
- b) Membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari.
- c) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan mengikuti lomba diluar sekolah.
- d) Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan, melalui pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon Kepala Sekolah.
- e) Mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan/latihan, pertemuan, seminar, diskusi dan bahan-bahan.

2. Kepala Sekolah sebagai Manajer (*Manager*)

- a) Mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling.
- b) Mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data administrasi kesiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler secara lengkap.

- c) Mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi tenaga guru dan Tata Usaha.
 - d) Mengelola administrasi keuangan Rutin, BOS, dan Komite.
 - e) Mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi gedung/ruang, mobiler, alat laboratorium, perpustakaan.
3. Kepala Sekolah sebagai Pengelola Administrasi (*Administrator*)
- a) Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
 - b) Menyusun organisasi ketenagaan disekolah baik Wakasek, Pembantu Kepala Sekolah, Walikelas, Kasubag Tata Usaha, Bendahara, dan Personalia Pendukung misalnya pembina perpustakaan, pramuka, OSIS, Olah raga. Personalia kegiatan temporer, seperti Panitia Ujian, panitia peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya.
 - c) Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
 - d) Mengoptimalkan sumberdaya manusia secara optimal, memanfaatkan sarana / prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik sekolah.
4. Kepala Sekolah sebagai Penyelia (*Supervisor*)
- a) Menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi pembelajaran.
 - b) Melaksanakan program supervisi.
 - c) Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru/karyawandan untuk pengembangan sekolah.

5. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (*Leader*)

- a) Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan berjiwa besar.
- b) Memahami kondisi guru, karyawan dan anak didik.
- c) Memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban.
- d) Mampu mengambil keputusan baik urusan intern maupun ekstern.
- e) Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis.

6. Kepala Sekolah sebagai Pembaharu (*Inovator*)

- a) Mampu mencari, menemukan dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain.
- b) Mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling, pengadaan dan pembinaan tenaga guru dan karyawan.
- c) Kegiatan ekstra kurikuler dan mampu melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di Komite dan masyarakat.

7. Kepala Sekolah sebagai Pendorong (*Motivator*)

- a) Mampu mengatur lingkungan kerja.
- b) Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai.
- c) Mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sanksi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Wakil Kepala Sekolah

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan

2. Pengorganisasian
 3. Pengarahan
 4. Ketenagaan
 5. Pengkoordinasian
 6. Pengawasan
 7. Penilaian
 8. Identifikasi dan pengumpulan data
 9. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan
 10. Membuat laporan secara berkala
- c. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) PKS I
- Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:
1. Menyusun program pengajaran
 2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
 3. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
 4. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir
 5. Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan
 6. Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB
 7. Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar
 8. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan
 9. Mengatur pengembangan MGMP/MGBP dan koordinator mata pelajaran
 10. Melakukan supervisi administrasi akademis
 11. Melakukan pengarsipan program kurikulum

12. Penyusunan laporan secara berkala

d. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) PKS II

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi:
Kepramukaan, PMR, KIR, UKS, PKS, Paskibraka, pesantren kilat
2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan kesiswaan/OSIS dalam rangka
3. Menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus OSIS
4. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
5. Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental
6. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima beasiswa
7. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
8. Mengatur mutasi siswa
9. Menyusun dan membuat kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru dan pelaksanaan MOS
10. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah
11. Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi
12. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala

e. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) PKS III

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana
2. Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana

3. Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran
 4. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana
 5. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah
 6. Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara rutin
- f. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) PKS IV
- Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:
1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah
 2. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid
 3. Membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya
 4. Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah
 5. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah
 6. Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah
 7. Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 9 K
 8. Menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan pameran hasil pendidikan (gebyar pendidikan)
 9. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat masalah-masalah yang bersifat umum
 10. Menyusun laporan secara berkala
- g. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Tata Usaha
- Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:
1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah

2. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar
 3. Pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah
 4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah
 5. Penyusunan administrasi sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan
 6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah secara keseluruhan
 7. Penyusunan tugas staf Tata Usaha dan tenaga teknis lainnya
 8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 9 K
 9. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala
- h. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Wali Kelas

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Pengelolaan Kelas:
 - a) Tugas Pokok meliputi:
 - 1) Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan
 - 2) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - 3) Membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik
 - 4) Membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak didik
 - b) Keadaan Anak Didik
 - 1) Mengetahui jumlah (Putra dan Putri) dan nama-nama anak didik
 - 2) Mengetahui identitas lain dari anak didik
 - 3) Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari
 - 4) Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik
 - c) Melakukan Penilaian

- 1) Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah
 - 2) Kerajinan, Kelakuan, dan Kedisiplinan anak
- d) Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu
- 1) Pemberitahuan , pembinaan, dan pengarahan
 - 2) Peringatan secara lisan dan tertulis
 - 3) Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah
- e) Langkah Tindak Lanjut
- 1) Memperhatikan buku nilai rapor anak didik
 - 2) Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik
 - 3) Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan
 - 4) Penyelenggaraan Administrasi Kelas, meliputi:
 - 5) Denah tempat duduk anak didik
 - 6) Papan absensi anak didik
 - 7) Daftar Pelajaran dan Daftar Piket
 - 8) Buku Presensi
 - 9) Buku Jurnal kelas
 - 10) Tata tertib kelas
 - 11) Penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik
 - 12) Pembuatan catatan khusus tentang anak didik
 - 13) Pencatatan mutasi anak didik
 - 14) Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar
- i. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Guru
- Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:
1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian.
4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
6. Mengisi daftar nilai anak didik
7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran
8. Membuat alat pelajaran/alat peraga
9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran
13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik
14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran
15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat

4.5. Pengolahan Data

Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan kesetaraan serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pencapaian tujuan dana BOS. Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pertanyaan diisi oleh responden terdiri dari 25 guru, 5 dari komite sekolah (tingkat SMP) dan 18 perwakilan wali murid dari kelas VII sampai XI sebanyak 48 orang dimana jawaban angket diberi nilai yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS)

sekor 1, Tidak Setuju (TS) sekor 2, Netral (N) sekor 3, Setuju (S) sekor 4, Sangat Setuju (SS) sekor 5. Data hasil jawaban responden adalah sebagai berikut :

4.5.1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas kuesioner Penelitian

Hasil pengujian instrumen variabel akuntabilitas (X_1) dalam pengelolaan SPSS 23 dapat dilihat pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1)

No	Butir Pernyataan	r- hitung	r- table	Keterangan
1	X _{1,1}	.503	0,30	Valid
2	X _{1,2}	.631	0,30	Valid
3	X _{1,3}	.639	0,30	Valid
4	X _{1,4}	.619	0,30	Valid
5	X _{1,5}	.663	0,30	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen variabel akuntabilitas (X_1) memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,30). Dengan demikian total item pernyataan yang digunakan pada variabel akuntabilitas (X_1) ada lima pertanyaan.

1. Hasil Uji Validitas Transparansi (X_2)

Hasil pengujian instrumen variabel transparansi (X_2) dalam pengelolaan SPSS 23 dapat dilihat pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_2)

No	Butir Pernyataan	r- hitung	r- table	Keterangan
1	X _{2,1}	.524	0,30	Valid
2	X _{2,2}	.706	0,30	Valid
3	X _{2,3}	.733	0,30	Valid

4	X _{2,4}	.680	0,30	Valid
5	X _{2,5}	.677	0,30	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen variabel transparansi (X₂) memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,30). Dengan demikian total item pernyataan yang digunakan pada variabel transparansi (X₂) ada lima pertanyaan.

2. Hasil Uji Validitas Efektifitas dan Efisiensi (X₃)

Hasil pengujian instrumen variabel efektifitas dan efisiensi (X₃) dalam pengelolaan SPSS 23 dapat dilihat pada Tabel 4.3 :

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas dan Efisiensi (X₃)

No	Butir Pernyataan	r- hitung	r- table	Keterangan
1	X _{3,1}	.717	0,30	Valid
2	X _{3,2}	.639	0,30	Valid
3	X _{3,3}	.692	0,30	Valid
4	X _{3,4}	.758	0,30	Valid
5	X _{3,5}	.547	0,30	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen variabel efektifitas dan efisiensi (X₃) memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,30). Dengan demikian total item pernyataan yang digunakan pada variabel efektifitas dan efisiensi (X₃) ada lima pertanyaan.

3. Hasil Uji Validitas Kesetaraan (X₄)

Hasil pengujian instrumen variabel kesetaraan (X₄) dalam pengelolaan SPSS 23 dapat dilihat pada Tabel 4.4 :

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Kesetaraan (X_4)

No	Butir Pernyataan	r- hitung	r- table	Keterangan
1	$X_{4,1}$.667	0,30	Valid
2	$X_{4,2}$.731	0,30	Valid
3	$X_{4,3}$.626	0,30	Valid
4	$X_{4,4}$.421	0,30	Valid
5	$X_{4,5}$.516	0,30	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen variabel kesetaraan (X_4) memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,30). Dengan demikian total item pernyataan yang digunakan pada variabel kesetaraan (X_4) ada lima pertanyaan.

4. Hasil Uji Validitas Pencapaian Tujuan Dana BOS (Y)

Hasil pengujian instrumen variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) dalam pengelolaan SPSS 23 dapat dilihat pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Variabel Pencapaian Tujuan Dana BOS (Y)

No	Butir Pernyataan	r- hitung	r- table	Keterangan
1	Y_1	.359	0,30	Valid
2	Y_2	.391	0,30	Valid
3	Y_3	.406	0,30	Valid
4	Y_4	.545	0,30	Valid
5	Y_5	.409	0,30	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,30). Dengan demikian total item pernyataan yang digunakan pada variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) ada delapan pertanyaan.

4.5.2. Uji Reliabilitas

Butir kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60 (Sunyoto, 2013).

Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
akuntabilitas (X ₁)	.814	Reliabel
transparansi (X ₂)	.849	Reliabel
efektifitas dan efisiensi (X ₃)	.855	Reliabel
kesetaraan (X ₄)	.803	Reliabel
pencapaian tujuan dana BOS (Y)	.663	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai alpha untuk akuntabilitas (X₁) sebesar 0,814, transparansi (X₂) sebesar 0,849, efektifitas dan efisiensi (X₃) sebesar 0,855 kesetaraan (X₄) sebesar 0, 803 dan pencapaian tujuan dana BOS (Y) sebesar 0,663. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan bersifat *reliable* sehingga dapat digunakan dalam hasil penelitian.

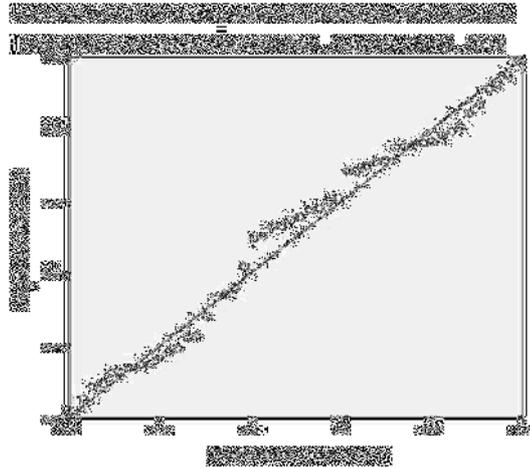
4.5.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil Uji normalitas data dilakukan dengan pengujian dengan, normal P-P Plot dan *Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan adalah

melihat angka probabilitas dengan ketentuan, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika probabilitas $< 0,05$ normalitas tidak terpenuhi.

Gambar 4.2. Grafik Normal P-P Plot



Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Hasil Grafik 4.2 menggambarkan pada garis diagonal data menyebar disepanjang garis diagonal, tidak ada data yang menyimpang dari garis diagonal terlalu jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *kolmogorov smirnov*. Berdasarkan hasil uji *kolmogorov-smirnov* diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.7. Hasil Uji Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.28572508
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.075
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.699
Asymp. Sig. (2-tailed)		.713

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui nilai *asympt. Sig.(2-tailed)* 0.713 di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan menggunakan *SPSS for Windows*, dapat dilihat dalam Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Akuntabilitas	.457	2.190
Transparansi	.438	2.285
Efektivitas_Efisiensi	.268	3.727
Kesetaraan	.428	2.339

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil analisis data diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel variabel eksogen yang dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

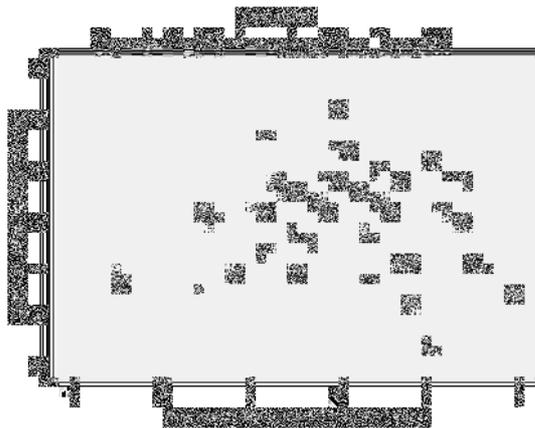
1. Hasil multikolinearitas pada variabel akuntabilitas (X_1) nilai *tolerance* $0,457 > 0,1$ dan VIF $2,190 < 10$, artinya variabel akuntabilitas (X_1) memenuhi ketentuan multikolinearitas.
2. Hasil multikolinearitas pada variabel transparansi (X_2) nilai *tolerance* $0,438 > 0,1$ dan VIF $2,285 < 10$, artinya variabel transparansi (X_2) memenuhi ketentuan multikolinearitas.
3. Hasil multikolinearitas pada variabel efektifitas dan efisiensi (X_3) nilai *tolerance* $0,268 > 0,1$ dan VIF $3,727 < 10$, artinya variabel efektifitas dan efisiensi (X_3) memenuhi ketentuan multikolinearitas.
4. Hasil multikolinearitas pada variabel kesetaraan (X_4) nilai *tolerance* $0,428 > 0,1$ dan VIF $2,339 < 10$, artinya variabel kesetaraan (X_4) memenuhi ketentuan multikolinearitas.

Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi ketentuan multikolinearitas artinya tidak terjadi saling berkorelasi atau saling berhubungan antara variabel-variabel bebas, analisis lebih lanjut dapat menggunakan model regresi berganda.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Menurut Ghozali (2011:139) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas diketahui hasil uji heteroskedastisitas bahwa data menyebar tidak membentuk pola. Hal ini menunjukkan bahwa data menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.4. Regresi Linier Berganda

Pengujian statistik dengan model regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), efektivitas dan efisiensi (X_3), kesetaraan (X_4), terhadap pencapaian ujian dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat. Rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 4.9. Hasil Analisis Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.669	1.737		6.142	.000
Akuntabilitas	.305	.118	.389	2.580	.013
Transparansi	.226	.105	.333	2.163	.036
Efektivitas_Efisiensi	-.306	.132	-.458	-2.329	.025
Kesetaraan	.355	.102	.543	3.486	.001

a. Dependent Variable: Pencapaian_Tujuan_Dana_BOS
Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 Diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = 10.669 + 0.305X_1 + 0.226X_2 - 0.306X_3 + 0.355X_4$$

Penjelasan nilai model di atas adalah sebagai berikut:

a. $\alpha = 10.669$

nilai konstanta α sebesar 10.669 menjelaskan bahwa apabila variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), efektifitas dan efisiensi (X_3) dan kesetaraan (X_4) bernilai nol, maka variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) yang terbentuk sebesar 10.669.

b. $\beta_1 = 0.305$

Konstanta β_1 bernilai 0.305 menjelaskan bahwa apabila variabel akuntabilitas (X_1) meningkat satu satuan, maka variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) akan meningkat sebesar 0.305.

c. $\beta_2 = 0.226$

Konstanta β_2 bernilai 0,226 menjelaskan bahwa apabila variabel transparansi (X_2) meningkat satu satuan, maka variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) akan meningkat sebesar 0,226.

d. $\beta_3 = - 0.306$

Konstanta β_3 bernilai $- 0.306$ menjelaskan bahwa apabila variabel efektifitas dan efisiensi (X_3) meningkat satu satuan, maka variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) akan menurun sebesar -0.306 .

e. $\beta_4 = 0.355$

Konstanta β_4 bernilai 0.355 menjelaskan bahwa apabila variabel kesetaraan (X_4) meningkat satu satuan, maka variabel pencapaian tujuan dana BOS (Y) akan meningkat sebesar 0.355

4.5.5. Hasil Uji Hipotesis

j. Hasil Uji F

Adapun hasil Uji F (simultan) dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	96.221	4	24.055	13.313	.000 ^b
Residual	77.695	43	1.807		
Total	173.917	47			

a. Dependent Variable: Pencapaian_Tujuan_Dana_BOS

b. Predictors: (Constant), Kesetaraan, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas_Efisiensi

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa nilai F_{hitung} sebesar $13.313 > F_{tabel} 2,71$ dan sig F sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), efektifitas dan efisiensi (X_3) dan kesetaraan (X_4) berpengaruh secara simultan

terhadap pencapaian tujuan dana BOS (Y). Hasil penelitian ini menjawab hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan *Good Governace* terhadap pencapaian tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah BOS diterima.

k. Hasil Uji t

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai t_{hitung} dari akuntabilitas (X_1) yaitu $2.580 > t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikan untuk akuntabilitas (X_1) sebesar $0,013 < \alpha 0,05$, sehingga variabel akuntabilitas (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS (Y), dengan demikian maka hipotesis diterima.
2. Nilai t_{hitung} dari transparansi (X_2) yaitu $2.163 > t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikan untuk transparansi (X_2) sebesar $0,036 < \alpha 0,05$, sehingga variabel transparansi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS (Y), dengan demikian maka hipotesis diterima.
3. Nilai t_{hitung} dari efektifitas dan efisiensi (X_3) yaitu $-2.329 > t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikan untuk efektifitas dan efisiensi (X_3) sebesar $0,025 < \alpha 0,05$, sehingga variabel efektifitas dan efisiensi (X_3) bernilai negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS (Y), dengan demikian maka hipotesis tidak diterima.
4. Nilai t_{hitung} dari kesetaraan (X_4) yaitu $3.486 > t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikan untuk kesetaraan (X_4) sebesar $0,001 < \alpha 0,05$,

sehingga variabel kesetaraan (X_4) berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS (Y), dengan demikian maka hipotesis diterima.

1. Hasil Uji Determinasi

Dari hasil pengolahan SPSS yang diperoleh hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut.

Tabel 4.11. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.553	.512	1.344

a. Predictors: (Constant), Kesetaraan, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Efisiensi

b. Dependent Variable: Pencapaian_Tujuan_Dana_BOS

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Nilai koefisien korelasi berganda (*Adjusted R Square*) sebesar 0,512. Hal tersebut menunjukkan bahwa 51,2% pencapaian tujuan dana BOS (Y) dapat dijelaskan oleh akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), efektifitas dan efisiensi (X_3) dan kesetaraan (X_4). Sedangkan sisanya 48,8% ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian seperti partisipasi, pengawasan, profesionalisme.

4.6. Pembahasan

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai satuan pendidikan sebagai bentuk perwujudan program wajib belajar sembilan tahun. *Good Governance* adalah suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengetahui bahwa penerapan *good governance* (akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta kesetaraan) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pencapaian tujuan dana BOS. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *good governance* (akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta kesetaraan) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

Akuntabilitas merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan sekolah dalam pencapaian tujuan dana BOS. Hasil dalam penelitian yang diperoleh secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca budi Namotongan Kec.kutambaru Kab. Langkat. Hal ini sejalan dengan penelitian L.Jurhanie Isfan Pratama (2016) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemcapaian tujuan dana BOS. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam pencapaian tujuan Dana BOS dibutuhkan penerapan akuntabilitas, sebab akuntabilitas yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Transparansi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan sekolah. Hasil dalam penelitian yang diperoleh dari transparansi dalam penerapan *good governance* terhadap pencapaian tujuan dana pada SMP Swasta Panca budi Namotongan Kec.kutambaru Kab. Langkat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan Hal ini sejalan dengan Penelitian L.Jurhanie Isfan Pratama (2016), hal ini berarti transparansi memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS. Lebih jelasnya adalah, semakin tinggi usaha dalam pencapaian tujuan dana BOS dan pengelolaannya maka semakin tinggi transparansi yang harus diterapkan. Transparansi pada penelitian ini di ukur dari sejauh mana pihak pengelolaan dana BOS dalam melakukan publikasi laporan pengelolaan dana BOS serta menjalankan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan menyajikannya secara wajar serta dilaporkan secara berkala kepada Kadiknas.

Efektifitas dan efesiensi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa efektifitas dan efesiensi dalam penerapan *good governance* secara parsial pada penelitian ini bernilai negatif terhadap pencapaian tujuan dan BOS, hal ini dapat dilihat dari penyaluran dana BOS yang tidak sesuai dengan realisasi yang sudah di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sejalan dengan penelitian Fauzan (2013) . Maka dari itu pihak sekolah harus lebih meningkatkan penyaluran dana BOS dengan cara penerapan *good governance* agar berdampak pada meningkatnya pengelolaan dana BOS.

Kesetaraan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan sekolah. Hasil dalam penelitian ini yang diperoleh dari kesetaraan dalam penerapan *good governance* dimana secara parsial kesetaraan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Fauzan (2013) dimana kesetaraan bernilai positif pada penerapan *good governance* terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana BOS, maka dari itu pihak sekolah harus mempertahankan prinsip kesetaraan dalam pengelolaan dana BOS. Karena semakin tinggi tingkat pada pengelolaan dana BOS maka semakin tinggi pula tingkat kesetaraan yang harus diterapkan.

Pada penelitian menunjukkan bahwa hubungan simultan atau bersama-sama (uji F) antara variabel akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta kesetaraan terhadap pencapaian tujuan dana BOS. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta kesetaraan berpengaruh secara simultan terhadap pencapaian tujuan dana BOS. Dalam penelitian ini juga ini sesuai dengan penelitian L. Jurhanie Isfan Pratam (2016) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS baik secara parsial maupun simultan, sedangkan dengan penelitian Fauzan (2013) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta kesetaraan berpengaruh positif secara simultan sedangkan secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS.

Pada koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa 51,2% variabel pencapaian tujuan dana BOS dapat dijelaskan pada penerapan *good governance*

(akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efesiensi, serta kesetaraan) maka pencapaian tujuan dana BOS juga akan meningkat. Namun, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti kebijakan kepala sekolah mengatasi permasalahan dana yang kurang dalam memenuhi sarana dan prasarana serta gaji guru, kebijakan guru dalam pengembangan proses belajar mengajar dengan keterbatasan alat praga, dan kebijakan staf tata usaha dalam mengerjakan Rancangan Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) serta Renacana Anggaran Pendapatan dan Belanj Sekolah (RAPBS) pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat. Sebab penerapan *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efesiensi, serta kesetaraan) sangat penting dalam pencapaian tujuan dana BOS untuk mengukur kepemimpinan kepala sekolah dalam mengambil dan memutuskan suatu kebijakan dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS, mencakup pelaksanaan dana BOS, pembukuan dan pelaporan dana BOS secara berkala, dikarenakan dana BOS merupakan dana pendidikan dari pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai *good governance* terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, maka kesimpulan pada penelitian ini :

- a. Akuntabilitas Transparansi, dan kesetaraan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.
- b. Efektivitas dan efisiensi, secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.
- c. Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Dan Efisiensi, serta Kesetaraan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan dana BOS pada SMP Swasta Panca Budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.
- d. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 51,2% pencapaian tujuan dana BOS dapat diperoleh dalam penerapan *good governance* (Akuntabilitas, Tranparansi, Efektvitas dan Efesien, serta Kesetaraan). Sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi faktor lain yaitu seperti kebijakan kepala sekolah mengatasi dana yang kurang dalam memenuhi sarana dan prasaran serta gaji guru, kebijakan guru dalam pengembangan proses belajar

mengajar dengan keterbatasan alat praga, dan kebijakan staf tata usaha dalam mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada SMP Swasta Panca budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan kualitas *good governance* di lingkungan sekolah SMP Swasta Panca budi Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat. Beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pengelolaan dana BOS agar mencapai tujuan hendaknya kepala sekolah dapat menjalankan atau menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efesiensi. Serta kesetaraan dalam mengelola dana BOS agar mencapai tujuan dan disarankan lebih memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada dalam laporan keuangan dan laporan pengelolaan dana BOS sehingga yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan lebih bisa diandalkan.
- b. Bagi komite sekolah agar mengoptimalkan peran setiap pengurus yang ada ikut turut serta dalam peningkatan praktik manajemen serta pencapaian pengelolaan dana BOS.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang kembali mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* dengan mengeksplorasi kembali indikator-indikator untuk mengukur setiap variabel nya seperti partisipasi, pengawasan, profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar O. Aldiano. 2015. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Unit Pelayanan Terpadu di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Volume 8, Universitas Sumatera Utara.
- Ali Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H., E.S. Wahyuni, S. Effendy, S. Bahri, M.F. Rambe, dan F.B. Saksono. (2019). "The Moderating Effect of Personality on Organizational Citizenship Behavior: The Case of University Lecturers". *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, Volume 8 No. 2S, pp. 412-416.
- Bastian Indra. 2015. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daim A. Nuryanto. 2014. *Hukum Administrasi*. Surabaya: Laskambang Justitia.
- Dwilita, H. (2019). PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN INDONESIA STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Fauzan. 2013. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Prodi Akuntansi, Universitas Kanjuruhan Malang.

- Febrina, A. (2019). MOTIF ORANG TUA MENGUNGGAH FOTO ANAK DI INSTAGRAM (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek). *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-65.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)* Semarang : Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, L. N. (2019, August). Financial Performance and Profitability Of Islamic Banking On Economic Growth In Indonesia. In INTERNATIONAL HALAL CONFERENCE & EXHIBITION 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 28-34).
- Nurhidayah May, Sarsiti. 2014. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana BOS Di SMP Biingual Boarding School (SBBS)*. Prodi Akuntansi Universitas Surakarta.
- Pane, D. N. (2018). ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS KONSUMEN ALFAMART CABANG AYAHANDA). *JUMANT*, 9(1), 13-25.
- Pramono, C. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR HARGA OBLIGASI PERUSAHAAN KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Pratama Isfan L.Jurhanie. 2016. *Analisis Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Rusiadi, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS Eviews, Amos, Lisrel*. Medan: USU Press
- Sapri Farid Ahmad. 2017. *Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar*. Prodi Akuntansi Universitas Makassar
- Setiawan, A. (2018). PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 191-203
- Waruwu, A. A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *JUMANT*, 10(2), 1-14.

Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

Siswanto Ely. 2013. *Good University Governance Prinsip dan Implementasi Dalam Penggalian Pendapatan*. Malang: Gunung Samudera.

Sugiyono. 2010 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Sunyoto Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis Untuk, Mahasiswa, Dosen, dan Praktisi*. Yogyakarta: CAPS.

Supraja, G. (2019). PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.